



RENCANA KINERJA TAHUNAN

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2026 dapat diselesaikan. RKT Bappeda merupakan dokumen perencanaan Kinerja Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. RKT Bappeda Tahun 2026 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026.

Dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Bappeda yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2026.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen RKT BAPPEDA Tahun 2026. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, khususnya bagi aparatur BAPPEDA Banda Aceh dalam upaya pencapaian seluruh rencana kinerja BAPPEDA di tahun 2026.

Banda Aceh, 12 Januari 2026
Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



M. Nurdin, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196804201990111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum BAPPEDA Kota Banda Aceh.....	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Tujuan Penyusunan RKT	13
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	1
2.1. Visi dan Misi	1
2.2. Tujuan, Sasaran dan Program.....	5
BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA	1
3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Tahun 2026	1
3.2. Penetapan Kinerja.....	15
BAB IV PENUTUP.....	1
LAMPIRAN:	
A. Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2025-2029	
B. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026	
C. Struktur Organisasi Bappeda Tahun 2026	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum BAPPEDA Kota Banda Aceh

Tata kelola Pemerintahan yang baik tentu harus didukung oleh manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel yang dapat diwujudkan dengan cara menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga hasil yang diharapkan dari pelaksanaan setiap program pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berpijak pada azas profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Terlaksananya Good Governance merupakan prasyarat setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Memenuhi hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen ini disusun dengan cermat serta dalam pelaksanaanya dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berjenjang dan berkala, maka diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal dalam merealisasikan sasaran dari program-program dan kegiatan sebagaimana yang dituangkan dan ingin dicapai dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang bermuara dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen RKT BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2026 menjadi tolok ukur tingkat akuntabilitas kinerja BAPPEDA dalam upaya pencapaian dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran, sekaligus sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 dari kepala BAPPEDA kepada Walikota Banda Aceh. Dokumen ini akan mengurai seluruh tugas dan fungsi BAPPEDA serta seluruh program kerja yang mendukung pencapaian target kinerja di tahun 2026.

1.2 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan BAPPEDA untuk dapat mengelola seluruh proses perencanaan di daerah termasuk penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun rencana tahunan. Peran tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Banda Aceh.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2026 diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut mengurai struktur BAPPEDA Kota Banda Aceh ke dalam 3 bidang perencanaan pembangunan, bidang riset, bidang sekretariat, UPTB GIS, serta kelompok fungsional perencanaan.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh sesuai Perwal Nomer 36 Tahun 2022, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat;
 3. Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi;
 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 6. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 7. UPTB GIS; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Sekretariat, membawahi:
- a. Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - b. Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda; dan

- c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (2) Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi membawahi:
 - a. 3 Fungsional Perencana Ahli Muda
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi:
 - a. 3 Fungsional Perencana Ahli Muda;
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. 3 Fungsional Perencana Ahli Muda;
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - a. 3 Fungsional Perencana Ahli Muda;

1.2.1 Susunan Kepegawaian

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk peningkatan kinerja. Kondisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 31 Desember 2025 sebanyak 67 orang, PNS sebanyak 48 orang, dan P3K sebanyak 19 orang. Klasifikasi Jumlah pegawai Bappeda berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1. dan tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering

Uraian	Jumlah
Kepala	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kabid	4 Orang
Kasubbag	1 Orang
Fungsional Perencana	20 Orang
Analisis Keuangan Pusat/Daerah	1 Orang
Fungsional Umum	20 Orang
P3K	19 Orang

Sumber : Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2025

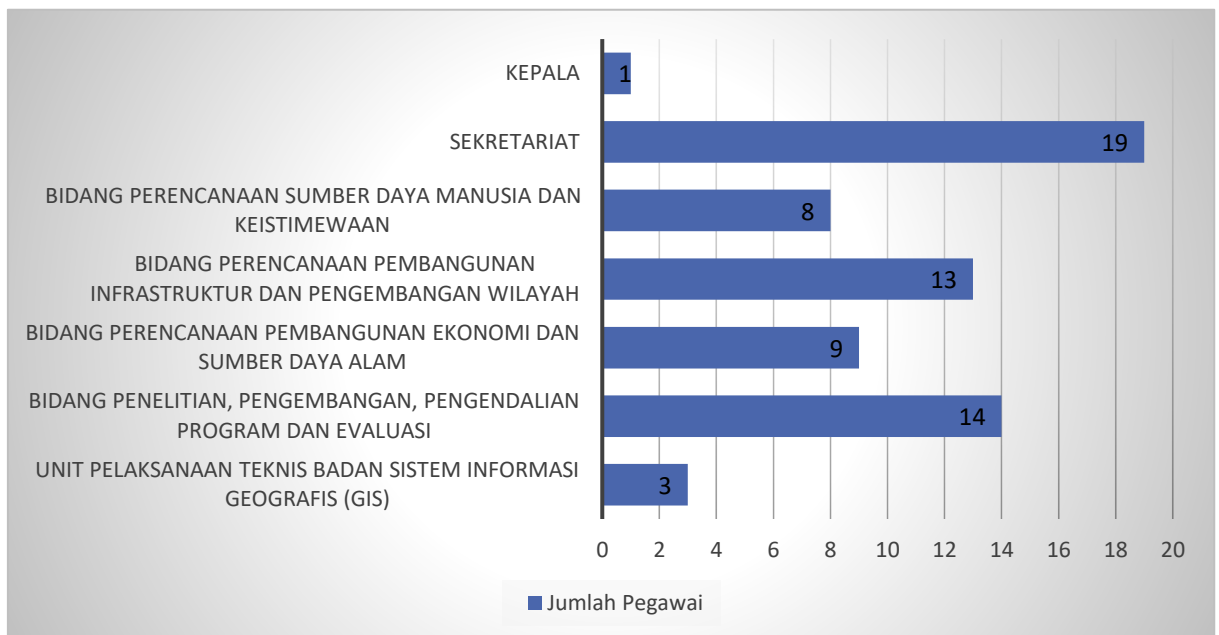
Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Tingkat	Jumlah (orang)
1	S3	1
2	S2	23
3	S1	34
4	Diploma/Sederajat	3
5	SMA/Sederajat	5
	SMP	1
Jumlah		67

Sumber : Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas diketahui bahwa Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada Strata 1 sebanyak 34 orang, diikuti oleh Strata 2 sebanyak 23 orang. Adapun sebaran jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh menurut bidang dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1
Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Menurut Bidang Tahun 2025



Sumber: Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2025

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik, BAPPEDA membutuhkan tenaga Fungsional Perencana Ahli pada setiap tingkatan. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 264 Tahun 2024 tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, menunjukkan adanya kebutuhan Perencana Ahli Madya sebanyak 41 orang, Perencana Ahli Muda sebanyak 58 orang, dan Perencana Ahli Pertama 95 orang. Dengan rata-rata kebutuhan di masing-masing perangkat daerah sebanyak 3 orang. Hal ini sangat penting untuk mendukung tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan pada level perangkat daerah.

BAPPEDA sendiri memiliki formasi Fungsional Perencana Ahli Madya sebanyak 15 orang, Perencana Ahli Muda sebanyak 24 orang, dan Perencana Ahli Pertama 32 orang. Hingga awal tahun 2025, tenaga fungsional perencana yang tersedia pada BAPPEDA adalah 1 orang Perencana Ahli Madya, 11 orang Perencana Ahli Muda, serta 8 orang Perencana Ahli Pertama. Selain Fungsional Perencana, BAPPEDA juga memiliki tenaga Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda sebanyak 1 orang yang bertugas mengelola internal

keuangan BAPPEDA. Rincian formasi tenaga fungsional pada BAPPEDA Kota Banda Aceh terlihat pada Tabel berikut:

Tabel. 1.3
Formasi Fungsional pada BAPPEDA Kota Banda Aceh

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Terpenuhi	Jumlah Kekurangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencana Ahli Madya	12	15	1	14	
2	Perencana Ahli Muda	10	24	11	13	
3	Perencana Ahli Pertama	8	32	8	24	
4	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	9	1	1	0	

Sumber: Subbagian Kepegawaian dan Aset, BAPPEDA, 2025

Selain tenaga Fungsional Perencana, BAPPEDA yang juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengembangan riset dan inovasi daerah, tentunya membutuhkan dukungan tenaga Fungsional peneliti. Namun demikian hingga saat ini, Fungsional Peneliti pada BAPPEDA Kota Banda Aceh masih belum tersedia.

1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Buku Inventaris

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Nilai Aset (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah	1	6.336.087.000	
2	Gedung dan Bangunan	4	3.546.148.000	
3	Peralatan dan Mesin	632	3.287.081.197	
4	Instalasi Solar Panel	2	123.601.000	
	TOTAL		13.292.917.197	

Sumber: Laporan Inventaris Aset BAPPEDA, 2025

1.2.3 Tugas dan Fungsi

BAPPEDA bertugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ Tugas dan Fungsi Kepala BAPPEDA

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah.

▪ **Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum;
- c. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi**

Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan**

Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sumber daya manusia dan keistimewaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Kelompok Fungsional Perencana**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

▪ **Tugas dan Fungsi UPTB-GIS**

UPTB-GIS/SIG BAPPEDA Kota Banda Aceh terbentuk melalui Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. UPTB SIG mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan teknis Badan yang berhubungan dengan pelayanan informasi geografis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTB GIS menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Basis Data Spasial Kota dalam rangka Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- b. pemberian dukungan dan kontrol terhadap kegiatan Penyusunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. pelaksanaan pemutakhiran (*updating*) data spasial Kota dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan survei untuk penyusunan Rencana Pembangunan Kota; dan

- e. pengoordinasian Pertukaran Data (*Data Exchange*) dan penggunaan basis data yang sama antar SKPD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Kota.

1.3 Tujuan Penyusunan RKT

Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BAPPEDA Kota Banda Aceh menjadi bagian penting dalam penentuan target dan sasaran kinerja yang terukur khususnya di tahun 2026. Adapun yang menjadi tujuan penyusunan RKT BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2026 adalah:

- Sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2026; dan
- Sebagai bahan dan salah satu dasar acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dan program kerja selama masa jabatan kepala daerah. Penyusunan Visi Kepala Daerah terpilih dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 40 Ayat 1 dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Visi Kota Banda Aceh periode Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi walikota dan wakil walikota terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah yaitu:

BANDA ACEH KOTA KOLABORASI.

Visi ini merujuk pada tujuan dan arah pembangunan Kota Banda Aceh yang mengedepankan prinsip kolaborasi antar berbagai pihak baik antar pemerintah, sector swasta, akademisi, masyarakat dan organisasi lainnya dengan menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama yang erat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup di Kota Banda Aceh. Visi ini tidak hanya mencerminkan semangat kerja bersama, tetapi juga menjadi arah strategis dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang berdaya saing, ramah terhadap inovasi, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan dalam bingkai nilai-nilai keislaman dan keberagaman. Dalam mewujudkan Banda Aceh Kota Kolaborasi juga melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang termasuk kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya karena keberagaman yang dimiliki bukanlah hambatan melainkan kekuatan sehingga juga harus diberikan ruang dan kesempatan untuk berperan aktif dan terlibat terhadap kemajuan kota. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Banda Aceh juga diarahkan menjadi kota yang

tidak hanya berkembang secara fisik dan ekonomi, tetapi juga tumbuh sebagai ruang yang nyaman, adil, dan mendukung kualitas hidup seluruh warganya, dari sekarang hingga generasi yang akan datang.

2.1.1 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan pemahaman dan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam penyusunannya, perumusan misi memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi juga disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran visi yang demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi, berkualitas dan dapat diakses dengan mudah pada sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Pelayanan dasar yang dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan dan layanan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, diharapkan terjadi perbaikan signifikan dalam hal aksesibilitas, mutu, efisiensi, serta pemerataan layanan di seluruh wilayah dan menjadi landasan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera dan inklusif.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Adaptif, Inovatif dan Responsif

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance, clean governance, dan smart governance. Konsep tersebut merujuk pada kualitas dan efektivitas pengelolaan pemerintahan yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam konteks ini, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yaitu adaptif, inovatif, dan responsif. Tata kelola yang adaptif dimaknai sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan sistem kerja dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Sementara itu, inovatif mengacu pada semangat untuk menciptakan solusi-solusi baru guna mempercepat pelayanan dan efisiensi birokrasi, serta responsif berarti kehadiran pemerintah yang cepat tanggap dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat juga termasuk partisipasi dalam pencegahan narkoba dan judi.

3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah

Misi ini bertujuan untuk membangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong inovasi daerah, serta memperluas akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pengetahuan. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan ekonomi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas. Dengan pendekatan kolaboratif yang terarah dan berorientasi pada hasil, misi ini bertujuan untuk menjadikan daerah lebih kompetitif, inklusif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan pembangunan di tingkat nasional maupun global.

4. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi lainnya untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Banda Aceh. Pemanfaatan sumber daya dilakukan melalui strategi pembangunan yang berbasis potensi lokal, penguatan sector unggulan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, serta penciptaan nilai tambah yang berdaya saing. Tujuan utamanya adalah agar potensi yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh dapat digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi secara maksimal dan berkelanjutan maka dapat menciptakan kota yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat.

5. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya

Misi ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan budaya di Kota Banda Aceh sebagai landasan dalam membangun karakter dan moral masyarakat, sekaligus menjaga dan melestarikan warisan budaya serta tradisi lokal yang telah menjadi identitas khas kota ini. Melalui peningkatan nilai-nilai agama dan budaya, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan memiliki rasa bangga terhadap warisan budaya serta agama yang menjadi pedoman hidup mereka.

6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan akses kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi serta kesiapan dalam menghadapi tantangan. Generasi muda merupakan elemen kunci dalam pembangunan daerah karena memiliki energi, kreativitas, dan potensi inovasi yang tinggi. Oleh karena itu, misi ini diarahkan pada penguatan peran pemuda melalui pendekatan pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemberdayaan generasi muda tidak hanya mencakup pengembangan kapasitas individu, tetapi juga penciptaan ekosistem sosial dan ekonomi yang mendorong mereka untuk aktif, mandiri, dan berkontribusi positif terhadap

pembangunan. Dengan menggabungkan kedua elemen yaitu pemberdayaan generasi muda dan pengembangan olahraga diharapkan dapat menciptakan individu yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri dan daya saing.

7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Banda Aceh tetap sehat, bersih dan berkelanjutan agar dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang. Menjaga kelestarian lingkungan hidup berarti menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya pelestariannya, agar tetap dapat mendukung kehidupan masyarakat kini dan generasi mendatang.

Misi ini juga berfokus pada upaya untuk melindungi sumber daya alam, mengurangi kerusakan lingkungan, dan memelihara keseimbangan ekosistem yang penting untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan misi ini, pembangunan diarahkan untuk tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, guna menciptakan wilayah yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Program

Tujuan, sasaran dan program OPD merupakan bagian penting dalam upaya pencapaian target pembangunan Kota. Penentuan tujuan, sasaran dan program pada rencana strategis BAPPEDA Kota Banda Aceh disusun sesuai konsep yang telah diatur dalam Permendagri Nomer 86 Tahun 2017 dan merujuk pada dokumen RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029.

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode pembangunan jangka menengah. Tujuan Renstra BAPPEDA periode 2025-2029 ditentukan dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta sasaran dari RPJMD Kota Banda Aceh. Meskipun BAPPEDA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 2 (dua) bidang urusan, namun sesuai arahan Inmendagri No 2 Tahun 2025, kedua urusan tersebut dapat dituangkan ke dalam 1 (satu) tujuan organisasi. Adapun tujuan Renstra Bappeda 2025–2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Peran Riset Dan Inovasi Dalam Mendukung Perencanaan Daerah”.

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) program perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan mengakomodir 2 (dua) bidang urusan yang menjadi tanggungjawab Bappeda, maka Renstra Bappeda periode 2025–2029, diuraikan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif;
2. Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah.

Tabel 2.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPEDA 2025 - 2029 beserta Indikator dan Target Capaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Predikat SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB	Penilaian SAKIP Daerah yang diterbitkan oleh KemenPAN-RB)
			Indeks Inovasi Daerah	35,42	40	43	46	48	50	60	Skor IID yang diterbitkan Kemendagri disetiap tahunnya
		Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	21,23	21,43	21,63	21,83	22,03	22,23	22,43	Tahun 2023: 21,03 Tahun 2024: 21,23
		Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kebijakan berbasis penelitian dan riset yang diterapkan dibagi jumlah penelitian dan riset yang direkomendasikan dikali 100%

2.2.3 Program Kerja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra BAPPEDA 2025-2029 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis tersebut BAPPEDA Kota Banda Aceh memiliki 5 Program yang terdiri dari 1 Program Penunjang, 2 Program Perencanaan dan 2 Program terkait penelitian dan pengembangan. Untuk mencapai seluruh target kinerja seluruh program tersebut, BAPPEDA merencanakan pelaksanaan total kegiatan sebanyak 18 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.3.1. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.4.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.4.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

1.4.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.

- 1.4.5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.5.1. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
 - 1.6.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.7.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.7.2. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - 2.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - 2.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2.1. Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.3.1. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

2.4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah.

2.4.1. Sub kegiatan Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

3.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

3.1.1. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

3.1.2. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

3.1.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

3.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

- 3.2.1. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 3.2.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
- 3.2.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
- 3.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 3.3.1. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.3.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.3.3. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan.
 - 3.3.4. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
- 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
 - 4.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - 4.1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.
 - 4.1.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.
 - 4.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
 - 4.2.1. Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

4.3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

4.3.1. Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

4.3.2. Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

5. Program Riset dan Inovasi, terdiri dari:

5.1. Kegiatan Inovasi dan Inovasi

5.1.1. Sub Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Untuk Apresiasi Prestasi Inovasi

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Tahun 2026

Program kerja tahun 2026 disusun berdasarkan program kerja jangka menengah sesuai rencana strategis BAPPEDA periode 2025-2029. Kegiatan yang menjadi core business BAPPEDA seperti pelaksanaan proses musrenbang dan penyusunan dokumen perencanaan daerah, serta kegiatan asistensi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan OPD diperkirakan sama disetiap tahunnya. Namun demikian keberadaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan ini tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan daerah disetiap tahunnya.

Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA melaksanakan tugas pada dua bidang urusan yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Riset dan Inovasi Daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan tugasnya, program kerja BAPPEDA dipisahkan ke dalam dua kelompok urusan tersebut. Secara keseluruhan, ditahun 2026 terdapat 4 program.

Berikut adalah rincian uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BAPPEDA Kota Banda Aceh di Tahun 2026, berdasarkan bidang urusan.

A. URUSAN PENUNJANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini merupakan program yang mendukung kelancaran operasional BAPPEDA. Program ini memastikan bahwa seluruh urusan di BAPPEDA Kota Banda Aceh di tahun 2026 dapat berjalan dengan baik. Pada program penunjang inilah diidentifikasi seluruh kebutuhan dasar organisasi seperti kebutuhan gaji dan administrasi pendukung, kebutuhan listrik, air, alat dan sarana komunikasi, kendaraan dinas, serta peralatan modal lainnya.

Tanpa program penunjang, roda organisasi dapat terhambat dan terkendala pelaksanaannya.

Seluruh kegiatan dan Sub kegiatan pada BAPPEDA Kota Banda Aceh yang mendukung program penunjang di tahun 2026, adalah sebagai berikut:

5.2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

5.2.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

5.3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

5.3.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

5.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

5.4.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

5.4.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

5.4.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5.4.4. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.

5.4.5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

5.5.1. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

5.6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.

5.6.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

5.7.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

5.7.2. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

B. URUSAN PERENCANAAN

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program ini berisikan kegiatan utama Bappeda termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Konsultasi Publik, Musrenbang, Forum Perangkat Daerah, penyusunan dokumen perencanaan daerah, analisis data perencanaan, hingga pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini menjadi penentu utama keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu program prioritas Bappeda yang wajib dilaksanakan disetiap tahunnya.

Berikut adalah rincian kegiatan dan sub kegiatan terkait program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di tahun 2026.

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.

1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.

1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1 Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dibidang Pembangunan Daerah.

4.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain mengelola proses perencanaan pembangunan kota, Bappeda juga bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan khususnya antar perangkat daerah. Untuk memastikan seluruh perencanaan OPD sejalan dan selaras dengan perencanaan kota, Bappeda juga melakukan pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan OPD. Sinkronisasi juga dilakukan dengan pihak provinsi dan pemerintah pusat, khususnya terhadap perencanaan pembangunan kota yang didanai oleh sumber pendanaan lainnya seperti APBA maupun APBN.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- 1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
- 1.2 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - 2.1 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 3.1. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

C. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Melaksanakan penelitian merupakan salah satu fungsi Bappeda Kota Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran akan kondisi riil berbagai permasalahan maupun potensi yang ada di Kota Banda Aceh. Dengan demikian akan lebih banyak masukan dan dasar yang akurat bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program penelitian dan pengembangan daerah di tahun 2026:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - 1.1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
2. Kegiatan Penelitian Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
 - 2.1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.
3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - 3.1 Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Secara menyeluruh, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2026 lengkap dengan indikator dan targetnya, tergambar dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	Persen
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen
		1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen
		1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67	Orang/bulan
		1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	Persen
		1.3.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket

		1.3.2 Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket
		1.3.3 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	1	Paket
		1.3.4 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket
		1.3.5 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan
		1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen
		1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	Unit
		1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
		1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan
		1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan

		1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
		1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11	Unit
		1.6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	79	Unit
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif	SAKIP Komponen Perencanaan	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100	Persen
		2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100	Persen
		2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	1	Dokumen
		2.1.2 Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita acara

	2.1.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20	Berita acara
	2.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	2	Berita acara
	2.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen
	2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen
	2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Dokumen
	2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen
	2.3.1	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan

		2.4 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	100	Persen
		2.4.1 Sub kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3	Dokumen
		3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	Persen
		3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen
		3.1.1 Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	Laporan
		3.1.2 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	Laporan

	3.1.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan
	3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen
	3.2.1	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	18	Laporan
	3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan
	3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan
	3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen

		3.3.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	Laporan
		3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan
Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	Persen
		4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	Persen
		4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	Dokumen

		4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	Persen
		4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2	Dokumen
		4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	Persen
		4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen

3.2. Penetapan Kinerja

Keberhasilan BAPPEDA terlihat dari indikator dan target kinerja yang terukur, baik secara tahunan maupun secara jangka menengah dan jangka panjang. Dokumen RKT memaparkan seluruh kinerja BAPPEDA selama satu tahun. Seluruh indikator dan target kinerja BAPPEDA tahun 2026 ditetapkan dengan rumusan yang dapat diukur. Dengan demikian diharapkan seluruh rencana kerja tahunan BAPPEDA dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Untuk memudahkan pencapaian target kinerja perlu disusun suatu Penetapan Kinerja, yang merupakan kesepakatan atau perjanjian kinerja antara pimpinan instansi pemerintahan dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggungjawab. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dalam hal ini memiliki kesepakatan atau perjanjian kinerja dengan Walikota Banda Aceh sebagai kepala daerah yang memberikan amanah bagi pengelolaan proses perencanaan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut tergambar dari rumusan indikator sasaran strategis Bappeda Banda Aceh yang target pencapaiannya diukur disetiap tahunnya termasuk di tahun 2026.

Tabel 3.2. berikut adalah perjanjian kinerja Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dengan Walikota Banda Aceh di tahun 2026.

Tabel 3.2

Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2026

A. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ket
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	1. Predikat SAKIP	Predikat	B	
	2. Indeks Inovasi Daerah	Angka	43	

B. Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	ket
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif	1. SAKIP Komponen Perencanaan	Indeks	21,63	
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah	2. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	100	

C. Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target	ket
1	2	3	4	5
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak	Ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	

D. Anggaran Bappeda Kota Banda Aceh

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.589.486.204	
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	852.243.800	
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	651.502.700	
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	676.320.100	
Total		10.769.552.804	

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2026 merupakan komitmen Bappeda Kota Banda Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di Lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitasnya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh pada tahun 2026.

Lampiran I Rencana Strategis (RS) Tahun 2025-2029

Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra BAPPEDA 2025 - 2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah				1. Predikat SAKIP 2. Indeks Inovasi Daerah		
		Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif			SAKIP Komponen Perencanaan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD. 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya seluruh proses penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai peraturan yang berlaku	1. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik. 3. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. 4. Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota. 5. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	
						Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya data dan informasi pemerintahan daerah yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
						Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.		1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. 2. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. 3. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA.		2. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	1. Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian. 2. Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian. 3. Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.		3. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan wilayah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang infratraktur dan kewilayahan	1. Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Bidang Infrastruktur. 2. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur. 3. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. 4. Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Program Rutin/ Penunjang
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan. 3. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan. 4. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan. 5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. 2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial. 2. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
				Tersedianya rekomendasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1. Jumlah Dokumen Hasil penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan. 2. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	
						Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. 2. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
						Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi	Program Riset dan Inovasi	
				Tersedianya invensi dan inovasi daerah	1. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi.	Invensi dan Inovasi	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

Lampiran II Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	Persen
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen
		1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen
		1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67	Orang/bulan
		1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	Persen
		1.3.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket

		1.3.2 Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket
		1.3.3 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	1	Paket
		1.3.4 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket
		1.3.5 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan
		1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen
		1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	Unit
		1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
		1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan
		1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan

		1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
		1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11	Unit
		1.6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	79	Unit
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif	SAKIP Komponen Perencanaan	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100	Persen
		2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100	Persen
		2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	1	Dokumen
		2.1.2 Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita acara

	2.1.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20	Berita acara
	2.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	2	Berita acara
	2.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen
	2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen
	2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Dokumen
	2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen
	2.3.1	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan

		2.4 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	100	Persen
		2.4.1 Sub kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3	Dokumen
		3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	Persen
		3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen
		3.1.1 Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	Laporan
		3.1.2 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	Laporan

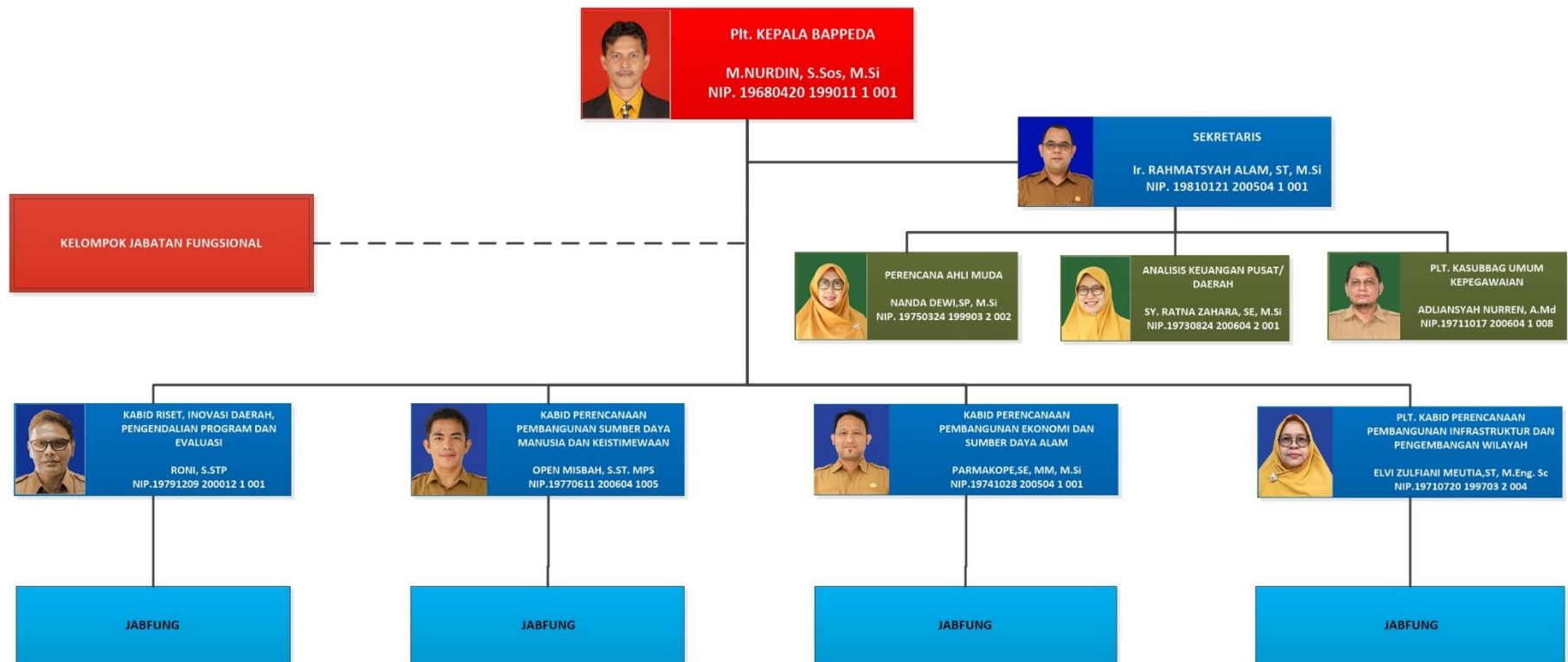
	3.1.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan
	3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen
	3.2.1	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	18	Laporan
	3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan
	3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan

		3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen
		3.3.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	Laporan
		3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan
Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	Persen
		4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	Persen

		4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	Dokumen
		4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	Persen
		4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2	Dokumen
		4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	Persen
		4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen

Lampiran III Struktur Organisasi Bappeda

**STRUKTUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA) KOTA BANDA ACEH
(Perwal Kota Banda Aceh Nomor: 36 Tahun 2022)**



**Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA
ACEH**

T.T.D

**M.NURDIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19680420 199011 1 001**



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397
Website <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>